

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

1. La Kuli, Abdul Halim Momo, Nerlin. (2023). Universitas Halu Oleo

“Partisipasi Warga BTN UNHALU Pada Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)”. Penelitian ini dilatarbelakangi

oleh berdirinya tempat pengolahan sampah (TPS-3R) di Kompleks perumahan BTN UNHALU pada tahun 2018. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa bentuk partisipasi Masyarakat Dalam program Pengelolaan sampah serta untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi warga BTN UNHALU pada program pengelolaan sampah. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi oleh Huraerah dalam Septiasa (2013). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan 10 informan dilakukan dengan *Purposive Snowball Sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi warga BTN UNHALU dalam pengelolaan sampah TPS 3R dilakukan dalam beberapa bentuk partisipasi, seperti: buah pikiran, tenaga, Harta benda, keterampilan dan juga berupa kegiatan sosial. Dari lima bentuk partisipasi

tersebut, partisipasi dalam bentuk harta benda merupakan partisipasi yang dominan, sedangkan partisipasi keterampilan merupakan partisipasi yang paling rendah dari bentuk-bentuk partisipasi warga BTN UNHALU pada program TPS 3R.

2. **Yahya Krisnawansyah. (2019). Universitas Negeri Padang “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah *Reduce Reuse Recycle* di Kabupaten Solok”.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kabupaten Solok yang mana merupakan kabupaten yang memiliki permasalahan sampah yang sangat rumit, permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok yang menjadi isu diantaranya yakni tidak dimaksimalkannya sarana pengolahan sampah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola Unit Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di Kabupaten Solok. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi oleh Nasdian dalam Fitriyanti (2014). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik purposive. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala wilayah, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat langsung dalam pengelolaan Unit Pengolahan Sampah 3R. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi, kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola Unit Pengolahan Sampah 3R di Kabupaten Solok. Sebagian besar masyarakat lebih mengharapkan adanya keuntungan finansial secara langsung, sehingga orientasi dari pengelolaan ini lebih menekankan pada nilai ekonomis.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Partisipasi Warga BTN UNHALU Pada Program Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS 3R), La Kuli, Abdul Halim Momo, Nerlin. (2023)	Kualitatif deskriptif	Partisipasi dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti: buah pikiran, tenaga, Harta benda, keterampilan dan juga berupa kegiatan sosial. Dari lima bentuk partisipasi tersebut, partisipasi dalam bentuk harta benda merupakan partisipasi yang dominan, sedangkan partisipasi keterampilan merupakan partisipasi yang paling rendah	Fokus membahas bentuk Partisipasi warga; Lokasi penelitian lingkungan perumahan Dosen BTN UNHALU Kota Kendari; Teori yang digunakan teori partisipasi oleh Huraerah dalam Septiasa.
2	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> di Kabupaten Solok, Yahya Krisnawansyah. (2019)	Kualitatif deskriptif	Partisipasi masyarakat masih kurang baik, Sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya manfaat finansial secara langsung, sehingga orientasi pengelolaan lebih menekankan pada nilai ekonomi.	Fokus membahas tingkat Partisipasi masyarakat ; Lokasi Kabupaten Solok; Teori yang digunakan teori partisipasi oleh Nasdian dalam Fitriyanti.

Sumber: Dibuat oleh Peneliti, 2025

B. Tinjauan Teoritis

1. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Menurut Borndy dalam Theresia dkk (2015:196) partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Menurut Keit Davis dan John W. Nestrom dalam Hamid (2018:148) Definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok, dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Definisi partisipasi tersebut mengandung beberapa unsur yaitu:

- 1) Adanya keterlibatan mental dan emosi, ini mengandung arti bahwa aspek mental-emosional yang mencerminkan faktor psikologis lebih menonjol dari pada aktivitas secara fisik dalam menyelesaikan tugas yang dilakukannya.
- 2) Adanya dorongan dalam diri seseorang (motivasi) untuk mau memberi sumbangan (kontribusi) baik berupa pikiran, tenaga, dana dan waktu. Di sini setiap individu diberikan peluang untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya bagi kepentingan kelompok. Jadi partisipasi yang tumbuh bukan hanya sekedar kesepakatan antara gagasan manajer dengan penerapan oleh anggota kelompoknya, tetapi lebih dari hal tersebut. Mekanisme yang terjadi telah mewujudkan adanya pertukaran sosial dua arah diantara mereka yang terlibat dalam kelompok tersebut, termasuk antara manajer dan anggotanya.

- 3) Adanya kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang diikutinya. Kondisi yang terjadi Adalah, adanya kebersamaan secara spontan dari diri masing-masing anggota yang terlibat untuk mewujudkan kebutuhan bersama. Tumbuhnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki merupakan pencerminan terhadap kerja yang dilakukannya, sehingga mencapai keberhasilan yang optimal. Dalam kondisi ini, maka para anggota kelompok memandang pimpinannya sebagai kontributor yang suportif bagi mereka.

Lebih lanjut di kemukakan bahwa secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar diri seseorang (ekstrinsik)

b. Bentuk Partisipasi

Sebagai suatu bentuk keterlibatan dalam suatu isu atau proses tertentu, partisipasi dipahami memiliki jenis yang bervariasi. Dalam hal ini, Brinkerhoff & Crosby dalam Hamdi (2015:152) menyatakan lima tipe partisipasi, yang mencakup keberbagian informasi, konsultasi, kolaborasi, pembuatan keputusan bersama, dan pemberdayaan. Selengkapnya pendapat Brinkerhoff & Crosby adalah sebagai berikut:

- 1) *Information-sharing: one-way information flows. Information-sharing serves to keep actors informed, to provide transparency, and to build legitimacy.*
- 2) *Consultation: two-way information flows and exchange of views. Consultation involves sharing information and gathering feedback and reaction.*
- 3) *Collaboration: joint activities in which the initiator invites other groups to be involved but retains decision-making authority and control.*
- 4) *Joint decision-making: collaboration where there is shared control over decisions made.*
- 5) *Empowerment: transfer of control over decision-making, resources, and activities from the initiator to other stakeholders.*

Menurut Desseldorp dalam Theresia dkk (2015:200)

mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi masyarakat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

c. Tingkat Partisipasi

Partisipasi itu berproses dan untuk membedakan prosesnya dibuatlah tangga atau tingkatan partisipasi. Teori tingkat partisipasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembobotan terhadap tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat. Konsep tingkat partisipasi dari berbagai teori dan pengalaman dalam bidang perencanaan partisipatif.

Menurut Sumarto dalam Nafurbenan dkk (2022:26)

mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Tinggi
 - a) Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan.
 - b) Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan
- 2) Sedang
 - a) Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu
 - b) Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian
- 3) Rendah
 - a) Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah
 - b) Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja.

- c) Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulan akan terhenti juga.

Sementara menurut Wilcox dalam Theresia dkk (2015:202)

mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan atau tahapan partisipasi, yaitu:

- 1) Memberikan informasi (*Information*)
- 2) Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- 3) Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang guna pengambilan keputusan.
- 4) Bertindak bersama (*Acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- 5) Memberikan dukungan (*Supporting independent community interest*), dimana menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

d. Variabel Penting dalam Partisipasi

Banyak faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi partisipasi seseorang atau sekelompok atau suatu masyarakat dalam kegiatan atau aktivitas bersama.

Menurut Ngusmanto (2015:140-147) ada 2 (dua) faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi partisipasi, Faktor-faktor tersebut ialah faktor eksternal dan faktor internal.

- 1) Faktor Eksternal
 - a) Aktor penggerak
Tinggi dan rendah atau aktif dan tidak aktif partisipasi atau kontribusi warga dipengaruhi oleh adanya aktor penggerak. Dalam realitas, memang ada partisipasi warga yang tumbuh karena kesadaran sendiri untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Sungguh pun begitu, partisipasi yang tumbuh karena kesadaran sendiri umumnya hanya dilakukan oleh sedikit warga atau jumlah mereka tidak banyak. Partisipasi yang tumbuh karena digerakkan oleh orang lain lebih mendominasi atau jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang tumbuh karena kesadaran.

b) Wahana yang tersedia
Wahana dalam hal ini bermakna seberapa besar peluang atau kesempatan yang tersedia bagi warga untuk berpartisipasi. Peluang ini sangat dipengaruhi oleh sistem demokrasi atau derajat keterbukaan yang berlaku. Semakin terbuka sistem yang dibangun, semakin besar peluang warga untuk berpartisipasi. Dalam realitas banyak ditemukan warga tidak ada peluang atau memiliki peluang yang terbatas untuk berpartisipasi, sehingga partisipasi warga tergolong rendah.

c) Sumber dana kegiatan
Partisipasi masyarakat akan menjadi aktif dan positif apabila sumber dana berasal dari swadaya masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, menikmati hasil, pengawasan dan evaluasi.

d) Pemilik kegiatan
Apabila pemilik kegiatan pemerintah dan diproyekkan atau dikotakkan kepada pihak ketiga maka kegiatan tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, apabila pemilik kegiatan masyarakat maka partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, menikmati hasil, pengawasan dan evaluasi akan mudah ditumbuhkan.

e) Manfaat langsung
Warga masyarakat yang mendapat manfaat langsung akan mudah disentuh untuk berpartisipasi, sehingga hasil-hasil pembangunan akan lebih terpelihara karena masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki.

2) Faktor Internal

a) Tingkat ekonomi

Makin sulit secara ekonomi, makin sulit dalam menggerakkan partisipasi warga. Penegasan ini logis karena warga yang secara ekonomi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan semakin terganggu hidupnya apabila waktu mereka dipergunakan untuk berpartisipasi dalam aktivitas bersama. Untuk itu, semakin tercukupi kebutuhan warga secara ekonomi, semakin mudah ia digerakkan dan sebaliknya. Hal ini dapat ditegaskan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh pada aktif tidaknya partisipasi warga. Warga dalam hal ini akan merasa malu jika secara ekonomi tercukupi, tetapi yang bersangkutan tidak berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Orang kaya memiliki status ekonomi yang tinggi dan akan menjadi malu jika ia tidak aktif berpartisipasi.

b) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi status sosial seseorang. Orang yang memiliki status sosial tinggi akan merasa malu apabila ia tidak aktif berpartisipasi dalam aktivitas bersama.

- c) **Tingkat pemahaman**
 Pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap aktivitas bersama seperti yang telah diungkapkan menjadi kunci awal untuk menumbuhkan partisipasi warga. Hal ini bermakna bahwa makin tahu dan paham terhadap aktivitas bersama, makin mudah seseorang digerakkan untuk berpartisipasi. Sebaliknya, semakin tidak tahu dan paham, semakin sulit mereka untuk berpartisipasi.
- d) **Tingkat kepedulian**
 Orang yang memiliki kepedulian terlihat dari perhatiannya, mau tahu, mau berbuat dan berkorban untuk orang lain atau aktivitas bersama dan kepentingan publik. Tidak ada kepedulian (cuek), tidak ada partisipasi. Mengapa partisipasi warga rendah? Jawabannya karena warga memiliki kepedulian yang rendah atau tidak memiliki kepedulian. Orang akan peduli apabila kegiatan bersama merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhannya.
- e) **Rasa ego**
 Ego berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang. Ego seseorang terlihat dari sikapnya yang keras kepala, mau benar dan menang sendiri, susah diatur dan tidak mau tahu dengan pendapat orang atau pihak lain. Makin tinggi ego seseorang, makin sulit untuk berpartisipasi dan makin besar jumlah mereka, makin sulit digerakkan untuk berpartisipasi.
- f) **Rasa memiliki**
 Rasa memiliki merupakan tingkatan yang tinggi dan tidak mudah ditumbuhkan. Penegasan ini logis karena seseorang yang telah tumbuh rasa memiliki, secara otomatis akan dibarengi tumbuhnya rasa tanggung jawab, rasa cinta dan siap berkorban, termasuk akan berperan aktif dan positif.
- g) **Jenis kelamin**
 Dalam berbagai aktivitas bersama, kaum laki-laki lebih banyak yang berpartisipasi dibandingkan kaum perempuan. Hal ini bermakna bahwa jenis kelamin menentukan partisipasi seseorang. Sungguh pun begitu, ada pula aktivitas bersama yang partisipasi perempuan lebih dominan dibandingkan kaum laki-laki seperti gerakan pos pelayanan terpadu (Posyandu), gerakan sayang ibu dan anak. Untuk itu, pengaruh jenis kelamin dalam partisipasi perlu memperhatikan jenis kegiatan bersama yang mau dikaji.
- h) **Tingkat umur**
 Tingkat umur bisa ditelusuri dari aspek usia anak-anak, remaja, dewasa dan tua atau anak-anak, pemuda dan dewasa (tua). Pengaruh tingkat umur terhadap partisipasi dalam aktivitas bersama harus memperhatikan pula jenis kegiatan bersama. Jika kegiatan bersama banyak berhubungan dengan dunia anak, maka partisipasi yang dominan tentu tingkat anak dan seterusnya.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat dalam Diandra (2021:42) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Roucek dan Waren dalam Diandra (2021:42) memberikan pendapat yang berbeda. Menurut mereka, masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama, berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama, dan sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat kebiasaan serta aktivitas yang sama.

Suatu masyarakat tidak terjadi begitu saja. Sebelum menjadi masyarakat, terlebih dahulu harus diawali dengan adanya sekelompok manusia yang banyak, yang telah mempunyai tempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu lama dan memiliki aturan-aturan yang mengatur kepentingan bersama. Setelah terdapat hal-hal tersebut, barulah terbentuk suatu masyarakat.

b. Faktor-faktor terbentuknya Masyarakat

Menurut Diandra (2021:43-44) suatu masyarakat tidak terjadi begitu saja. Sebelum menjadi masyarakat, terlebih dahulu harus diawali dengan adanya sekelompok manusia yang banyak, yang telah mempunyai tempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu lama dan memiliki aturan-aturan yang mengatur kepentingan Bersama.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu masyarakat, antara lain:

- 1) Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar biologis, seperti sandang, pangan, dan papan;
- 2) Keinginan untuk bersatu dengan manusia lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup;
- 3) Keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidup;
- 4) Keinginan untuk mengembangkan keturunan melalui keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil; dan
- 5) Kecenderungan sosial manusia, yaitu seluruh tingkah lakunya yang berkembang melalui interaksi sosial dengan sesama manusia.

Jadi, masyarakat timbul dari kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Salah satu faktor yang penting dalam pembentukan masyarakat dari kelompok individu adalah waktu. Waktu inilah yang memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk bekerja sama dan mengemukakan pola-pola tingkah laku dan sikap yang bersifat timbal balik, serta menemukan teknik-teknik hidup bersama.

Dengan adanya waktu yang cukup lama, timbullah syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat, yaitu adanya proses adaptasi dan organisasi perilaku para anggota kelompok, sehingga timbullah kesadaran berkelompok. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang bisa mengikat satu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat, yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan tersebut, adat istiadat, norma-norma, hukum, aturan-aturan yang khas dan adanya suatu rasa identitas di antara para warga atau anggotanya bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lain.

3. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Theresia dkk (2015:197) Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya,

Menurut Hamdi (2015:150-151) Partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan dan pengembangannya memerlukan waktu, sumber daya, pemahaman dan ketekunan. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat secara sukarela, selain juga merupakan gambaran dari pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan pernyataan tersebut, partisipasi dapat dipahami sebagai suatu proses melalui dimana masyarakat mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, termasuk berbagi kontrol terhadap sumber daya yang mempengaruhi mereka. Masyarakat hanya akan berpartisipasi ketika mereka merasa mengetahui tujuan yang akan dicapai serta tolok ukur keberhasilan yang mereka nilai bermanfaat untuk kehidupan mereka.

b. Faktor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningrum dalam Hutagalung (2022:15) faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- 1) Sifat malas, apatis, masa bodo, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
- 2) Aspek-aspek tipologis.
- 3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya).
- 4) Demografis (jumlah penduduk).
- 5) Ekonomi (desa miskin/tertinggal).

Sementara Solekhan dalam Hutagalung (2022:16) mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

- 1) Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat.
Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- 2) Melemahnya Modal Sosial.
Modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Theresia dalam Hutagalung (2022:16-17) mengidentifikasi beberapa masalah kaitannya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 1) Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - a) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatur) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
 - b) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
- 2) Masalah kedua adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

c. Syarat tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Theresia dkk (2015:206) Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian, ekonomi, sosial, fisik maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya, tidak selalu diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Selanjutnya Slamet dalam Theresia dkk (2015:207-211) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada Masyarakat, untuk berpartisipasi
- 2) Adanya kemauan Masyarakat untuk berpartisipasi
- 3) Adanya kemampuan Masyarakat untuk berpartisipasi

Sedangkan Menurut Suyono dalam Hutagalung (2022:22) Paling tidak ada tiga syarat dalam proses tumbuhnya pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Kesadaran, kejelasan serta pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan.
- 2) Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak termasuk masyarakat tentang hal-hal apa, di mana, dan siapa yang akan diberdayakan.
- 3) Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan.

4. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah seperti yang dikatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah, dikatakan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

b. Pengertian Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan

cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya sekadar mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Sri Bebasari dari Indonesian Waste Forum (IWF) dalam Yudianto dkk (2019:10-11) mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 (lima) aspek yang melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran serta masyarakat dan teknologi yang membalut.

- 1) Aspek Hukum.
Kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah kita adalah tidak ada kebijakan secara nasional yang berakibat pada tidak menentukannya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya.
- 2) Aspek Institusi.
Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut lantaran tidak adanya Badan Khusus yang menangani masalah ini secara khusus.

- 3) Aspek Pendanaan.
Hingga kini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan padahal kalau dapat merubah pandangan ini dapat menjadikan sampah sebagai investasi yang bisa mendatangkan keuntungan, maka niscaya seluruh permasalahan sampah mudah untuk diatasi.
- 4) Peran Serta Masyarakat.
Kita harus mendorong kesadaran tiap manusia yang ada di Indonesia, bahwa masalah sampah merupakan hasil dari tindakan mereka juga. Jadi tanggung jawab mengenai masalah ini, merupakan tanggung jawab mereka juga.
- 5) Teknologi
Masih minimnya pengkajian teknologi dalam permasalahan sampah ini. Untuk masalah ini, ia menargetkan hingga 25 tahun mendatang paling tidak pengelolaan sampah kita harus sudah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, pasar, perkantoran dan Hotel.

Mengelola sampah dari hulu sesungguhnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan melakukan pemilahan/ pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Pemilahan tersebut misalnya dengan membagi apakah sampah tersebut sampah kering, sampah basah, atau sampah plastik dan botol. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan.

c. Manajemen Pengelolaan Sampah

Menurut Nafurbenan dkk (2022:51-53) Permasalahan sampah merupakan permasalahan serius yang dimiliki bersama-sama karena semua manusia merupakan pihak yang menghasilkan sampah. Sampah menjadi masalah ketika sampah mulai menumpuk dan kuantitasnya tidak dapat dikendalikan. Pengelolaan sampah yang efektif dapat mengurangi jumlah sampah sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, manfaat lain yang diperoleh dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi.

Namun tingginya partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Penyediaan tempat sampah, poster edukasi, truk sampah serta pengelolaan sampah berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dapat mengakomodir kepentingan permasalahan sampah di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi perbaikan pengelolaan sampah memerlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta diperlukan adanya upaya pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan yang baik dapat dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengurangi beban pemerintah, terutama untuk pewadahan dan pengangkutan sampah.

d. Konsep 3R

Menurut Yudianto dkk (2019:11-12) Konsepsi 3R yaitu (1) *reduce*, mendorong kita sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, (2) *re-use*, menggunakan kembali barang yang biasa dibuang dengan menghindari barang-barang yang disposable (sekali pakai buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah dan yang ke (3) *recycle* yaitu mendaur ulang. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka

untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi atau mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur berpikir peneliti dalam mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh). Kerangka pemikiran ini berdasar dari landasan normatif, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, serta teori Partisipasi Masyarakat menurut Slamet dalam Theresia dkk (2015:207-211) yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada Masyarakat, untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan Masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan Masyarakat untuk berpartisipasi

Dengan demikian penelitian ini diarahakan untuk menjawab 2 (Dua) pokok permasalahan yaitu:

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui TPS 3R Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus TPS 3R Buluh Berjaya di Desa Sungai Buluh) serta faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi tersebut.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

